

PAPUA BARAT

Nur Azizah: Kenaikan Harga BBM Memberatkan Rakyat

Updates. - PUBLIKPAPUABARAT.COM

Sep 20, 2022 - 07:33



Anggota Komisi VIII DPR RI Nur Azizah Tamhid

JAKARTA - Anggota Komisi VIII [DPR RI](#) Nur Azizah Tamhid menilai kenaikan harga bahan bakar minyak ([BBM](#)) memberatkan rakyat kecil. Menurutnya Bantuan Tunai Langsung ([BLT](#)) [BBM](#) yang diambil dari Kas Negara senilai Rp12,4 triliun bukanlah solusi. Meskipun pemerintah menyalurkan [BLT](#), hal tersebut hanyalah sementara. [BLT](#) tersebut tidak sebanding dengan dampak

jangka panjang yang dirasakan masyarakat kecil.

"Besaran [BLT BBM](#) senilai Rp600 ribu akan dibagikan kepada 20,65 juta masyarakat Indonesia yang terdaftar dalam DTKS yang diberikan dalam dua tahap dalam rentang 4 bulan. Namun yang menjadi permasalahan, [BLT](#) itu hanya bersifat sementara. Dana yang diberikan tidak sebanding dengan dampak jangka panjang yang akan timbul," ungkap Nur Azizah dalam keterangan persnya, baru-baru ini.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera ([PKS](#)) tersebut menambahkan bahwa kenaikan harga [BBM](#) bersubsidi Peralite dan Solar di saat kondisi ekonomi global tidak menentu akhirnya harus ditanggung oleh masyarakat. Menurutnya, hal ini seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah dalam mengendalikan penggunaan [BBM](#) bersubsidi, sehingga tidak menyebabkan volume penggunaannya melonjak tajam.

"(Kenaikan harga [BBM](#)) ini tentu mencekik masyarakat kecil. Seperti nelayan di beberapa wilayah yang sudah menggantungkan mata pencaharian yang pas-pasan, mengandalkan subsidi [BBM](#). Dengan kenaikan (harga [BBM](#)) ini, mereka harus berhenti melaut, karena pengeluaran menjadi lebih besar dari pendapatan. Kenaikan harga [BBM](#) ini tidak membuat harga ikan juga naik," kritik Nur Azizah.

Menurut legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat VI tersebut, pemerintah harus memiliki pertimbangan yang matang akan dampak yang ditimbulkan dari harga [BBM](#) naik. Terdapat hampir 70 persen subsidi BBM dinikmati oleh orang kaya, sedangkan subsidi LPG sebesar 76 persen justru dinikmati oleh masyarakat mampu.

Adapun masyarakat miskin dan rentan yang merasakan subsidi listrik hanya sekitar 26 persen. Hal ini menunjukkan penyaluran subsidi energi tidak tepat sasaran. Untuk itu, menurutnya pemerintah perlu segera melakukan koreksi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar [BBM](#) bersubsidi seperti Solar dan Peralite hanya dijual kepada masyarakat kurang mampu, pelaku ekonomi kecil dan transportasi umum.

"Pemerintah harus segera melakukan tindakan. Dengan berkurangnya volume [BBM](#) bersubsidi namun tepat sasaran, maka [BBM](#) bersubsidi tersebut tidak perlu dinaikkan harga jualnya. Hal ini penting, sehingga rakyat kecil dan pelaku usaha kecil tetap dapat membeli [BBM](#) dengan harga murah. Dengan demikian juga akan berdampak pada aktivitas ekonomi mereka dapat bangkit lebih kuat," papar Nur Azizah.

Selain itu, Nur Azizah menjelaskan, saat ini banyak beredar isu penyelundupan [BBM](#) bersubsidi beberapa waktu lalu di Jawa Tengah, Polri baru saja me ringkus penimbun sekaligus pengoplos puluhan ton [BBM](#) bersubsidi. Hal ini menimbulkan potensi kerugian negara yang juga tidak sedikit, bahkan ditaksir hingga Rp 11 miliar. "Penangkapan yang dilakukan Polri ini menjadi bukti adanya penyelundupan [BBM](#). [BBM](#) yang disubsidi dari uang rakyat melalui pajak itu justru dinikmati oleh sektor industri," tandas Nur Azizah. (rnm/sf)